

## PERSEPSI GURU DI PAPUA TERHADAP PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

**Magdalena Chori Rahmawati**

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
[magdalena.chori@atmajaya.ac.id](mailto:magdalena.chori@atmajaya.ac.id)

**Edwita**

Pendas Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta  
[edwita@unj.ac.id](mailto:edwita@unj.ac.id)

**Durotul Yatimah**

Pendas Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta  
[dyatimah@unj.ac.id](mailto:dyatimah@unj.ac.id)

**Abstract:** The compulsory education program aims to ensure that every citizen receives a proper basic education. However, the implementation of this program faces various challenges, especially related to the perception of teachers as the main actors in implementing education policies. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2023, Papua Province has the lowest Average Years of Schooling (RLS). This research aims to obtain an overview of the perceptions of teachers in Papua towards the 12-year compulsory education program and the factors that influence their views. The research method used is a mixed methods sequential explanatory model. The respondents in the research were 20 teachers who taught in various regions in Papua. Data collection was carried out using questionnaires and interviews. The research results show that teachers have a fairly good understanding of the 12-year compulsory education program. The teachers recommended several suggestions to increase the effectiveness of the 12-year compulsory education program, such as: building boarding schools, intensive training for teachers, socialization of the program involving community leaders, and a curriculum based on local wisdom.

**Keywords:** teacher perception, average length of school, 12-year compulsory education program

**Abstrak:** Program wajib belajar bertujuan untuk memastikan setiap warga negara mendapat pendidikan dasar yang layak. Namun, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan persepsi guru sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 Provinsi Papua memiliki Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) paling rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi guru di Papua terhadap program wajib belajar 12 tahun serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi (mixed methods) model sequential explanatory. Responden dalam penelitian adalah 20 guru yang mengajar di berbagai daerah di Papua. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan para guru memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap program wajib belajar 12 tahun. Para guru merekomendasikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas program wajib belajar 12 tahun seperti: pembangunan sekolah berasrama, peningkatan intensif bagi guru, sosialisasi program melibatkan tokoh masyarakat, dan kurikulum berbasis kearifan lokal.

**Kata Kunci:** persepsi guru, rata-rata lama sekolah, program wajib belajar 12 tahun

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Kemajuan suatu bangsa ditandai dengan majunya kesempatan mendapatkan pendidikan yang luas dan berkualitas (Tohir dkk., 2022). Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai implementasi nyata dari amanat UUD 1945 maka pemerintah mencanangkan program wajib belajar.

Program wajib belajar di Indonesia adalah kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara mendapat pendidikan dasar yang layak. Kebijakan wajib belajar pertama kali dicanangkan tahun 1984 dengan fokus program memastikan setiap anak usia sekolah mengikuti pendidikan dasar selama 6 tahun di tingkat Sekolah Dasar. Tahun 1994 program wajib belajar diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama. Tahun 2015 program wajib belajar diperluas kembali menjadi 12 tahun, dengan fokus program pendidikan gratis bagi anak-anak usia 7 – 18 tahun, sampai jenjang menengah atau dari SD/MI sampai SMA/SMK/MA (Priadi Talman & Chaeruddin, 2016).

Meskipun program wajib belajar sudah berjalan sejak tahun 1984 dan terus berkembang hingga saat ini menjadi wajib belajar 12 tahun, tantangan untuk mencapai target tersebut masih sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia mencapai 8,77 tahun. Namun, beberapa provinsi masih memiliki RLS di bawah angka nasional tersebut. Berikut adalah daftar provinsi dengan RLS terendah pada tahun 2023: 7,34; Kalimantan Barat 8,17; Nusa Tenggara Timur 8,31; Nusa Tenggara Barat 8,39.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tersebut menunjukkan Provinsi Papua memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa provinsi Papua masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setiadi dkk., 2017.) di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa dari 8.065 sampel individu usia 18 tahun ke atas, didapatkan angka ketuntasan belajar 12 tahun ada sebanyak 3.182 yang tuntas atau 39,45%, sementara sisanya tidak memiliki ijazah SMA.

Penelitian yang dilakukan (Kichi Hermansyah dkk., 2024) tentang analisis penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah

di Kabupaten Asmat Papua menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah meliputi persebaran jenjang pendidikan yang tidak merata, keterbatasan akses pendidikan, dan kurangnya tenaga pendidik. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Rahmadina, 2020) menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ sederajat di Provinsi Papua memiliki nilai rata-rata sebesar 63,26%. Terdapat 17 kabupaten/kota dengan nilai APK SMA/ sederajat di bawah rata-rata, hal itu menunjukkan bahwa lebih dari setengah wilayah Provinsi Papua memiliki nilai APK SMA/ sederajat di bawah rata-rata.

Berdasarkan paparan terkait rendahnya angka RLS di Papua dan hasil penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang membahas tentang pandangan guru terhadap program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Padahal guru adalah ujung tombak pelaksanaan proram wajib belajar karena guru berperan dalam memfasilitasi, memandu, dan mendukung siswa dalam pembelajaran (Policy & Practice A Development Education Review, 2018).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan di daerah dengan tantangan unik seperti Papua. Persepsi guru

sangat penting karena mereka berada di garis depan dalam implementasi kebijakan ini dan memiliki pemahaman langsung mengenai hambatan yang terjadi di lapangan. Dengan memahami perspektif mereka, diharapkan solusi yang lebih tepat dapat dirumuskan guna meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program wajib belajar 12 tahun. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi guru di Papua terhadap program wajib belajar 12 tahun.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kombinasi (mixed methods). Mixed methods research design (rancangan penelitian metode campuran) merupakan suatu prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan dalam penelitian (Creswell & Hirose, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Mixed Method model sequential explanatory, yaitu pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama (Creswell, 2016)

Data kuantitatif diambil dengan menggunakan angket bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum pandangan guru di Papua terhadap program wajib belajar 12 tahun. Pengambilan data kualitatif dilakukan melalui wawancara yang bertujuan mendalami hasil angket dengan menggali pengalaman pribadi responden dan konteks lokal.

Pengambilan data kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi serta memahami makna suatu hal dari individu atau kelompok. (Nuryana & Utari, 2019) menjelaskan bahwa pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengembangkan pemahaman tentang arti suatu peristiwa yang dialami individu. Fenomenologi juga dinyatakan sebagai pendekatan untuk menceritakan kembali fenomena yang dialami oleh individu dan menganalisisnya untuk menemukan pembahasan lebih lanjut.

Jumlah responden dalam pengambilan data melalui angket adalah 20 guru yang mengajar di berbagai daerah di Papua. Jumlah partisipan dalam wawancara adalah 3 orang yang terdiri dari: 1 orang dosen sekaligus pimpinan Yayasan Persekolahan Kristen dan 2 orang guru yang mengajar di SD Negeri Kasuari

Marsram Papua dan SD Inpres Yenggarbun Supiori Utara Papua.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis data berdasarkan hasil angket dan wawancara. Hasil angket dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pola umum pandangan guru. Peneliti melakukan analisis fenomenologi untuk mengetahui dan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data wawancara dan memahami esensi dari pandangan guru. Peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman, analisis dilakukan secara interaktif melalui tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan.

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data hasil wawancara terkait pandangan guru tentang program wajib belajar 12 tahun. Bagian-bagian data yang relevan tentang bagaimana guru memahami, menerapkan, dan tantangan dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun disaring. Selanjutnya data yang sudah direduksi disederhanakan dan dikelompokkan berdasarkan pandangan guru terhadap program wajib belajar 12 tahun, lalu disajikan dalam bentuk narasi. Peneliti selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan.

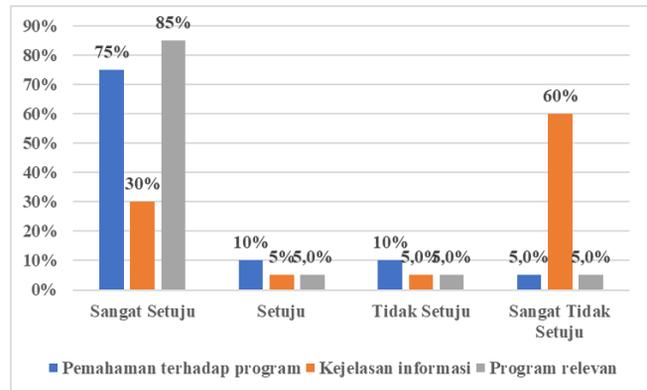
**HASIL**

Berikut adalah hasil pengambilan data kuantitatif melalui angket yang disebarakan ke 20 responden yang merupakan para guru di Papua.

**Pemahaman tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Tabel 1. Pemahaman tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun

Pernyataan	SS	S	TS	ST	Jml
Saya memahami tujuan dari program wajib belajar 12 tahun.	15	2	2	1	20
Pemerintah telah memberikan informasi yang jelas tentang program ini.	6	1	1	12	20
Program wajib belajar 12 tahun relevan dengan kebutuhan pendidikan di Papua.	17	1	1	1	20
	75%	10%	10%	5%	



Gambar 1. Pemahaman tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun

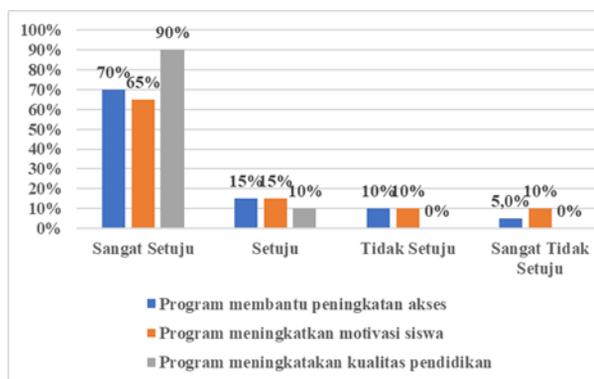
Sebagian besar guru menunjukkan pemahaman yang baik tentang program wajib belajar 12 tahun. 85% menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa mereka sangat memahami tujuan dari program wajib belajar 12 tahun. Namun 65% menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju jika pemerintah telah memberikan informasi yang jelas terkait program wajib belajar 12 tahun. 90% guru menyatakan program wajib belajar 12 tahun sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan di Papua.

**Pandangan tentang Manfaat Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Tabel 2. Pandangan tentang Manfaat Program Wajib belajar 12 tahun

Pernyataan	SS	S	TS	STS
Program wajib belajar 12 tahun membantu meningkatkan akses	14	3	2	1
	70%	15%	10%	5%

pendidikan di daerah terpencil.				
Program ini meningkatkan motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.	13	3	2	2
Saya merasa program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.	65%	15%	10%	10%
	18	2	0	0
	90%	10%	0%	0%



Gambar 2. Pandangan tentang Manfaat Program Wajib Belajar 12 Tahun

Para guru pada umumnya memiliki pandangan yang positif tentang manfaat program wajib belajar 12 tahun. 85% guru sangat setuju dan setuju bahwa program wajib belajar dapat meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. 80% guru sangat setuju dan setuju bahwa program wajib belajar 12 tahun dapat meningkatkan

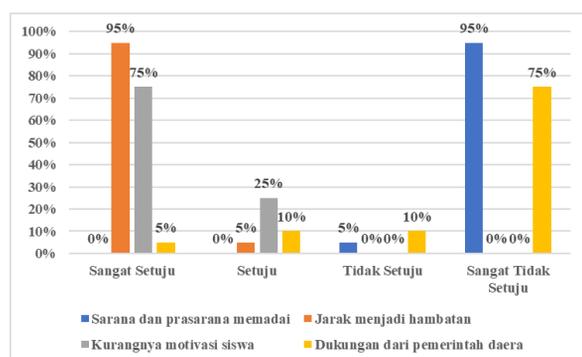
motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. 100% guru sangat setuju dan setuju bahwa program wajib belajar 12 tahun dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.

### Tantangan dalam Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun

Tabel 3. Tantangan dalam Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun

Pernyataan	SS	S	TS	STS
Sarana dan prasarana di sekolah saya sudah memadai untuk mendukung program ini.	0	0	1	19
Jarak sekolah yang jauh menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program ini.	0%	0%	5%	95%
Saya merasa kurangnya motivasi siswa menjadi tantangan besar untuk program ini.	15	5	0	0
Dukungan	75%	25%	0%	0%
	1	2	2	15

dari 5% 10% 10% 75%  
 pemerintah  
 daerah  
 terhadap  
 program ini  
 sudah  
 memadai.



Gambar 3. Tantangan dalam Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun

Hasil angket menunjukkan bahwa para guru menghadapi beberapa hambatan dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun. 100% guru menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju jika sarana dan prasarana di sekolah sudah memadai untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun. 100% sangat setuju dan setuju jika jarak sekolah yang jauh menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program ini. 75% guru sangat setuju jika kurangnya motivasi siswa menjadi tantangan besar untuk program wajib belajar 12 tahun. 85% guru sangat tidak setuju dan tidak setuju jika dukungan dari pemerintah daerah terhadap program wajib belajar 12 tahun sudah memadai.

Berikut adalah hasil wawancara dengan 3 responden yang terdiri dari 2 orang guru yang berasal dari SD Negeri Kasuari Marsram Papua dan SD Inpres Yenggarbun Supiori Utara Papua Satu responden berikutnya adalah seorang dosen sekaligus ketua Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua.

### Pemahaman Guru Tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun

Hasil wawancara menunjukkan ketiga responden memahami tujuan utama program wajib belajar 12 tahun yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ketiga responden juga menyatakan hal yang sama jika program wajib belajar 12 tahun sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan di Papua. Namun sosialisasi dari pemerintah terkait program wajib belajar 12 tahun masih kurang maksimal. Guru menerima informasi terkait program hanya dari sekolah. Belum ada sosialisasi dari pemerintah atau dinas terkait.

Guru yang berasal dari SD Negeri Kasuari Marsram Papua menyatakan: “Kami hanya mendengar sekilas tentang program wajib belajar 12 tahun dari kepala

sekolah, tapi tidak ada sosialisasi langsung dari pemerintah terkait teknis pelaksanaan dan strateginya sehingga kami sendiri tidak yakin bagaimana menyampaikan informasi program kepada orang tua.”

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari guru yang berasal dari SD Inpres Yenggarbun Supiori Utara Papua: “Sebagian besar orang tua masih berpikir bahwa pendidikan sampai SMP saja sudah cukup. Mereka tidak tahu bahwa pemerintah memiliki program wajib belajar hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sebenarnya menguntungkan bagi anak-anak mereka.”

### **Manfaat Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Hasil wawancara terkait manfaat program menunjukkan jawaban yang beragam. Ketua YPK Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua menyatakan: “Untuk wilayah Papua perkotaan dan daerah yang lebih mudah dijangkau program wajib belajar 12 tahun berhasil meningkatkan partisipasi siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK.”

Selanjutnya Ketua YPK juga menyatakan: “Program wajib belajar 12 tahun menjadi langkah awal untuk menjembatani kesenjangan pendidikan antara Papua dan daerah lain di Indonesia.”

Guru yang berasal dari SD Inpres Yenggarbun Supiori Utara Papua menyatakan: “Program wajib belajar 12 tahun memberi peluang lebih besar bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang dapat mendukung mereka untuk melanjutkan ke universitas atau memasuki dunia kerja.”

Hal senada juga disampaikan oleh Guru yang berasal dari SD Negeri Kasuari Marsram Papua: “Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, siswa dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik. Siswa bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Sementara yang tidak melanjutkan ke PT dapat bekerja dibidang yang membutuhkan minimal ijazah SMA.”

### **Tantangan dalam Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Hasil wawancara menunjukkan tantangan yang beragam dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun. Guru yang berasal dari SD Negeri Kasuari Marsram Papua menyatakan: “Sebagian besar siswa yang tinggal di daerah terpencil harus berjalan kaki selama 2 – 3 jam untuk sampai ke sekolah. Tidak semua orang tua membiarkan anak-anaknya menempuh perjalanan yang sulit dan membutuhkan waktu lama setiap harinya.”

Guru yang berasal dari SD Inpres Yenggarbun Supiori Utara Papua menambahkan: “Masih banyak orang tua yang lebih memilih anak-anaknya membantu mencari nafkah daripada melanjutkan ke sekolah. Mereka belum memahami manfaat pendidikan jangka panjang.”

Tantangan yang berbeda disampaikan oleh Ketua YPK Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua: “Jumlah guru tidak mencukupi terutama untuk daerah terpencil. Kekurangan guru menyebabkan satu guru harus mengajar banyak mata pelajaran sekaligus, yang seringkali tidak sesuai dengan kompetensinya.” “Selain itu, insentif bagi guru di daerah terpencil dianggap kurang memadai, sehingga banyak guru enggan bertugas di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.”

### **Harapan dan Rekomendasi**

Berikut hasil wawancara terkait berbagai harapan dan rekomendasi yang disampaikan oleh para guru tentang program wajib belajar 12 tahun. Ketiga responden menyatakan harapan sama terkait perbaikan dan pengadaan infrastruktur pendidikan yang lebih merata, terutama untuk daerah terpencil.

Ketua YPK Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua menyatakan

harapannya: “Kami berharap pemerintah membangun lebih banyak sekolah berasrama untuk siswa yang tinggal jauh dari sekolah, agar mereka tidak perlu menempuh perjalanan yang sulit setiap harinya.”

Sementara guru yang berasal dari SD Inpres Yenggarbun Supiori Utara Papua menyatakan harapan agar guru di daerah terpencil lebih diperhatikan: “Guru membutuhkan dukungan berupa insentif atau tunjangan khusus, agar guru mau bertahan di daerah terpencil. Selain itu fasilitas tempat tinggal guru juga perlu diperhatikan.”

Guru yang berasal dari SD Negeri Kasuari Marsram Papua menyatakan harapan yang berbeda yaitu terkait sosialisasi program: “Pada saat sosialisasi program wajib belajar 12 tahun para tokoh adat dan agama perlu dilibatkan. Masyarakat akan lebih menerima jika informasi datang dari pihak yang mereka percaya.”

Ketiga responden memberikan rekomendasi yang sama yaitu agar pemerintah lebih aktif dalam memantau dan mengevaluasi implementasi program wajib belajar 12 tahun di daerah-daerah terpencil. Tujuannya adalah untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan

dan hambatan di lapangan dapat segera diatasi.

Ketua YPK Kabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua menyampaikan: "Kami berharap ada tim khusus dari pemerintah yang secara rutin memantau perkembangan program wajib belajar 12 tahun di daerah-daerah, sehingga kendala yang kami alami dapat segera ditangani." "Selain itu, kurikulum juga harus disesuaikan dengan kondisi budaya dan sosial Papua, agar siswa lebih memahami dan menghargai lingkungannya."

## **PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Guru Tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Guru memahami tujuan program wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Program wajib belajar 12 tahun juga relevan dengan kondisi di Papua. Namun, kurangnya sosialisasi terkait program mengindikasikan bahwa strategi komunikasi pemerintah perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Papua. Dinas Pendidikan harus menjamin bahwa masyarakat mendapat informasi

tentang program wajib belajar 12 tahun dan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari latar belakang yang kurang mampu (Pratiwi & Siswanto, 2023). Penerapan komunikasi pembangunan menjadi penting untuk diperhitungkan agar informasi tentang program ataupun kebijakan pemerintah dapat dikomunikasikan secara tepat sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan berpartisipasi aktif (Sulistiani dkk., 2017).

### **Manfaat Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Guru berpendapat program wajib belajar 12 tahun memberikan manfaat besar terutama dalam meningkatkan angka partisipasi siswa serta membuka peluang pendidikan yang lebih baik. Program wajib belajar 12 tahun juga mampu membantu siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Sehingga siswa berpeluang untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi atau bekerja. Namun dampak program belum dirasakan secara merata, terutama di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses untuk ke sekolah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan

pendidikan. Namun faktor geografis dan infrastruktur menjadi penghambat utama dalam mewujudkan manfaat program. Pendekatan desentralisasi pendidikan, seperti pembangunan sekolah berasrama dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kendala ini.

### **Tantangan dalam Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Tantangan utama yang ditemukan dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun adalah: 1) kondisi geografis wilayah Papua yang sulit diakses dan minimnya infrastruktur utama, 2) keterbatasan tenaga pendidik dan minimnya insentif bagi guru di daerah terpencil, 3) rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Tantangan-tantangan yang ditemukan dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun menunjukkan pentingnya intervensi yang lebih komprehensif dari pemerintah, termasuk peningkatan fasilitas serta pelibatan komunitas lokal dalam implementasi program.

Tantangan terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sejalan dengan hasil penelitian (Hakim, 2016) yang menyatakan meskipun wajib belajar tidak dipungut biaya atau gratis, tetapi kebanyakan orang tua

terutama di negara-negara yang berkembang menghalang-halangi masuknya anak-anak di sekolah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa wajib belajar erat kaitannya dengan masalah kemiskinan.

Temuan akan tantangan tersebut sejalan dengan hasil potret pendidikan yang dilaksanakan oleh (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019) menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pendidikan masih menjadi hal utama yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan, mengingat kondisi geografis Papua yang berbukit-bukit menyebabkan banyak wilayah yang masih tertinggal.

### **Harapan dan Rekomendasi**

Berbagai rekomendasi diberikan guru untuk meningkatkan keberhasilan program, seperti pembangunan sekolah berasrama, pelibatan tokoh adat dan agama dalam sosialisasi, serta peningkatan kesejahteraan guru. Fakta yang terjadi di Indonesia adalah cerminan kesejahteraan guru masih dianggap kurang, khususnya guru yang berpredikat sebagai honorer (Mansir, 2020). Dengan demikian kesejahteraan bagi semua guru perlu menjadi titik perhatian pemerintah dalam rangka mewujudkan pendidikan sejahtera untuk semua guru.

Para guru juga menekankan pentingnya kurikulum berbasis kearifan lokal untuk memastikan relevansi pendidikan bagi siswa Papua. Kurikulum berbasis kearifan lokal adalah kurikulum yang dibuat mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan peserta didik (Oktarina & Nisa, 2021). Dengan kurikulum berbasis kearifan lokal diharapkan akan tercipta lingkungan belajar yang tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku positif terhadap lingkungan sekitar (Ibaadurrahman dkk., 2024).

Rekomendasi dari guru tersebut menyoroti perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam implementasi program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah juga perlu melakukan berbagai strategi untuk mengatasinya. Hasil penelitian (Hardiasanti & Trihantoyo, 2016) menyatakan strategi pemerintah untuk menyelesaikan kendala tersebut yaitu dengan cara membangun fasilitas sekolah, memberikan beasiswa pendidikan, melakukan perbaikan akses pendidikan dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan. Strategi tersebut dilakukan dengan pendekatan struktural dan pendekatan perilaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa para guru memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap program wajib belajar 12 tahun. Mereka memiliki harapan besar terhadap keberhasilan program wajib belajar 12 tahun di Papua. Meskipun program wajib belajar 12 tahun memiliki potensi besar, intervensi tambahan diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam implementasinya.

Para guru merekomendasikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas program wajib belajar 12 tahun seperti: pembangunan sekolah berasrama, peningkatan intensif bagi guru, sosialisasi program melibatkan tokoh masyarakat, dan kurikulum berbasis kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). Reflections on the MMIRA The Future of Mixed Methods Task Force Report. Dalam *Journal of Mixed Methods Research* (Vol. 10, Nomor 3, hlm. 215–219). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/1558689816650298>
- Creswell, J. W., & Hirose, M. (2019). Mixed methods and survey research in family medicine and community health. *Family Medicine and Community Health*, 7(2).

- <https://doi.org/10.1136/fmch-2018-000086>
- Hakim, L. (2016). PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BAGI RAKYAT SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *Jurnal EduTech*, 2(1).
- Hardiasanti, M., & Trihantoyo, S. (2016). *IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL*.
- Ibaadurrahman, M., Aidil Viqri, A., Nugraha Putra Wikarsa, A., & Jaya Rajasa, A. (2024). KRITIK DAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PAPUA: ANALISIS IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA. Dalam *Jurnal Studi Multidisipliner* (Vol. 8, Nomor 12).
- Kichi Hermansyah, A., Nggaruaka, T., Sumarsono, A., Musamus Merauke, U., Jasmani, P., Rekreasi, dan, & Keguruan dan Ilmu Pendidikan -, F. (2024). POLICY BRIEF: RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN UPAYA PENINGKATANNYA DI KABUPATEN ASMAT, PROVINSI PAPUA SELATAN. *Jurnal Ilmiah PENDAS: Primary Education Journal*, 5, 2024. <https://doi.org/10.29303/pendas.v4i1>
- Mansir, F. (2020). *KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS GURU SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENDIDIKAN NASIONAL ERA DIGITAL*. 8(2). <https://unars.ac.id/ojs/index.php/pgsd> unars/index
- Nuryana, A., & Utari, P. (2019). *PENGANTAR METODE PENELITIAN KEPADA SUATU PENGERTIAN YANG MENDALAM MENGENAI KONSEP FENOMENOLOGI*. <http://jurnal.universitaskebangsaan.ac.id/index.php/ensains>
- Oktarina, E., & Nisa, A. F. (2021). DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL CARE-BASED CURRICULUM IN IMPROVING CHARACTER EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOLS. Dalam *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)* (Vol. 05). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jhss>
- Policy & Practice A Development Education Review*. (2018).
- Pratiwi, P., & Siswanto, E. (2023). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Pakis Implementation of the 12 Year Compulsory Education Program in Pakis Village. Dalam *Provider Jurnal Ilmu pemerintahan* (Vol. 2, Nomor 2).
- Priadi Talman, & Chaeruddin. (2016). *Wajib Belajar 12 Tahun Tantangan Regulasi dan Implementasi* (Fathu Ri SR, Ed.). New Indonesia.
- Setiadi, Y., Kurniawan, R., & Diantoro, D. G. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKTUNTASAN BELAJAR 12 TAHUN PADA PENDUDUK USIA 18 TAHUN KEATAS DI PROVINSI PAPUA BARAT BERDASARKAN HASIL SUSENAS TAHUN 2011 PROVINSI PAPUA BARAT*. [www.papuabaratprov.go.id](http://www.papuabaratprov.go.id)
- Sulistiani, <sup>1</sup>indah, Sugihen <sup>1</sup>sekolah Pascasarjana, G., Pertanian Bogor, I.,

Manusia, F. E., Pertanian, I., Kamper, B. J., & Barat, J. (2017). *ROLE OF COMMUNICATION IN THE COMMUNITY SOCIAL ENERGY DEVELOPMENT IN PAPUA* (Vol. 18, Nomor 1).

Tohir, M., Saputra, A., Iqbal Arrosyad, M., Juniati Lathiifah, I., Apriani, F., & Khilmi Ayu Firdausi, D. (2022). *MENINGKATKAN KESADARAN PENTINGNYA PENDIDIKAN MELALUI SEMINAR PARENTING DI DESA BATU BERIGA* (Vol. 2).